

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. R. Bintarto (2010:6) menyatakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur – unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan *cultural* yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah – daerah.

Di dalam desa terdapat pemerintahan khusus yang disebut Pemerintah Desa (Pemdes), yang merupakan unit pemerintahan terkecil yang berperan penting dalam proses pembangunan nasional. Dalam melaksanakan pembangunan, desa menerima berbagai program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun program khusus seperti Dana Bermasa [1]. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 pasal 27 huruf a menjelaskan bahwasannya "Yang dimaksud dengan "informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa", antara lain, adalah informasi mengenai penggunaan dana Desa bagi pelaksanaan program Pembangunan Desa, sehingga masyarakat mengetahui capaian program Pembangunan Desa dan prioritas penggunaan dana desa" [2]. Dengan adanya keterbukaan informasi mengenai penggunaan Dana Desa tersebut, masyarakat dapat mengetahui capaian dan prioritas program pembangunan Desa.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 pasal 17 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 menjelaskan bahwa "Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui sistem informasi Desa

dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Desa” [3]. mengamanatkan bahwa setiap kegiatan pembangunan perlu dikelola secara terbuka, terdokumentasi dengan baik, dan dapat diakses oleh masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 94 Tentang Desa menjelaskan bahwa ”Lembaga kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan”[4]. Ketentuan-ketentuan tersebut menekankan bahwa pengelolaan data pembangunan dan bantuan sosial desa wajib dilaksanakan sesuai asas transparansi dan akuntabilitas, tantangan terbesar yang sering dihadapi adalah memastikan bahwa pengelolaan data pembangunan dan bantuan sosial desa dapat dilaksanakan sesuai asas transparansi dan akuntabilitas.

Di banyak desa, termasuk Desa Mentayan yang berada di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Riau, pengelolaan data pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial saat ini masih mengandalkan pencatatan sederhana seperti *Microsoft Word* atau *Excel* yang bersifat tertutup dan manual, sehingga masyarakat tidak memperoleh informasi transparan mengenai realisasi penggunaan dana desa. Kondisi tersebut menyebabkan sistem informasi berjalan satu arah karena belum tersedianya fitur pengajuan bantuan secara mandiri bagi masyarakat untuk menginput kriteria syarat kelayakan, yang berdampak pada kurang akuratnya pendataan kondisi ekonomi warga karena hanya bergantung pada pencatatan internal perangkat desa. Selain itu, pengelolaan data yang tertumpuk sebagai lembaran arsip fisik menyulitkan perangkat desa dalam melakukan perekapan data secara cepat, valid, dan terstruktur untuk keperluan laporan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, permasalahan utama yang dihadapi adalah kebutuhan akan sistem informasi berbasis *website* yang mampu mengintegrasikan fitur pengajuan mandiri bagi warga sebagai bahan referensi musyawarah desa, sekaligus menyediakan fungsi perekapan otomatis bagi admin untuk menghasilkan laporan yang transparan, efektif, dan akuntabel.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penerapan sistem informasi berbasis *website* banyak dimanfaatkan dalam pengelolaan pemerintahan desa untuk mendukung keterbukaan informasi publik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi desa berbasis *web* berperan dalam menyediakan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya terkait kegiatan pembangunan dan bantuan sosial [5]. Selain itu, pembangunan desa berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif warga dalam proses pemantauan dan pengajuan bantuan. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa digitalisasi melalui sistem informasi pengajuan bantuan mampu menyederhanakan proses permohonan, mempercepat verifikasi, serta menyediakan basis data yang lebih aman dan terstruktur dibandingkan metode manual. Pemanfaatan sistem informasi pengajuan bantuan berbasis *web* juga terbukti memberikan dampak positif bagi aparatur pemerintah dalam mengontrol aktivitas pengajuan, mempermudah pembuatan laporan, serta meningkatkan efisiensi waktu kerja karena tidak lagi bergantung pada dokumen fisik [6]. Namun demikian, sistem informasi desa saat ini umumnya belum menggabungkan pengelolaan data pembangunan dan bantuan sosial dengan fungsi perekapan otomatis. Sistem ini juga dibangun sebagai sarana partisipasi masyarakat, di mana warga dapat melakukan pengajuan bantuan secara mandiri serta mengirim pesan aspirasi atau keluhan melalui sistem, sistem ini juga mempercepat proses administrasi sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem informasi berbasis *website* yang memungkinkan perangkat desa mengelola data pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial secara digital, kemudian untuk sarana partisipasi masyarakat, sistem menyediakan fitur pengajuan bantuan secara mandiri, serta fitur kirim pesan untuk menyampaikan aspirasi, saran dan keluhan. Seluruh data pengajuan tersebut akan diproses melalui fungsi perekapan otomatis menjadi rekapitulasi digital yang valid untuk mempermudah administrasi pelaporan desa sekaligus menjadi referensi utama dalam forum Musyawarah Desa. Melalui sistem ini, perangkat desa dapat menginput data kegiatan dan penerima bantuan

secara terstruktur lengkap dengan dokumentasi pendukung, sementara masyarakat memperoleh akses terbuka terhadap informasi realisasi anggaran serta daftar penerima bantuan sebagai wujud transparansi publik.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada “Rancang Bangun Aplikasi Pengelolaan Data Pembangunan Infrastruktur dan Bantuan Sosial Desa Mentayan Berbasis *Website*”. Sistem yang dibangun mampu membantu perangkat desa dalam pengelolaan data pembangunan dan bantuan sosial, meningkatkan keterbukaan informasi, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan adanya sistem ini, seluruh proses pengelolaan data pembangunan dan bantuan sosial desa dapat terdokumentasi dengan baik, mudah dipantau, dan dapat diakses secara terbuka, sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, dan berbasis teknologi informasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah yaitu:

Bagaimana merancang dan membangun aplikasi pengelolaan data pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial desa berbasis *website*. Serta, Bagaimana penerapan sistem ini dapat secara langsung mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengajuan bantuan secara mandiri serta menyampaikan aspirasi dan keluhan terhadap kegiatan pembangunan dan bantuan sosial di Desa Mentayan.

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi pengelolaan data pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial berbasis *website* ini hanya dirancang untuk Desa Mentayan, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis.
2. Sistem ini berfokus pada pengelolaan data pembangunan infrastruktur, dan bantuan sosial di Desa Mentayan.

3. Aplikasi ini hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan dan pelaporan data. Oleh karena itu, tidak ada pembahasan tentang perhitungan atau model khusus untuk penentuan kelayakan penerima bantuan atau prioritas pembangunan.
4. Fitur partisipasi masyarakat mencakup pengiriman aspirasi melalui pesan dan pengajuan bantuan secara mandiri dengan menginput kriteria syarat kelayakan.
5. Sistem hanya menyediakan rekapitulasi data sebagai bahan referensi Musyawarah Desa, sedangkan keputusan akhir kelayakan penerima bantuan tetap dilakukan secara manual oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat.
6. Sistem ini diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman PHP, *Framework Laravel*, dan Basis Data *MySQL/MariaDB*.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun aplikasi berbasis *website* untuk mengelola data pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial secara digital, guna menyediakan fungsi perekapan data otomatis yang mempermudah perangkat desa dalam proses administrasi dan pelaporan.
2. Menyediakan sarana partisipasi masyarakat melalui fitur pengajuan bantuan secara mandiri dan fitur penyampaian aspirasi, sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang transparan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah:

1. Bagi Pemerintah Desa Mentayan: Mempermudah perangkat desa dalam melakukan perekapan data secara cepat dan valid, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik yang tidak terstruktur, serta memudahkan pembuatan laporan.
2. Bagi Masyarakat Desa Mentayan: Memberikan ruang untuk berpartisipasi aktif melalui pengajuan bantuan secara mandiri, meningkatkan pengawasan terhadap realisasi pembangunan, serta memperkuat kepercayaan publik melalui transparansi data penerima bantuan.

3. Bagi Penulis (Mahasiswa): sebagai sarana penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam bentuk karya nyata berupa aplikasi berbasis *web* yang bermanfaat bagi masyarakat.